

Strategi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Regional-Based Development Strategies of Marine and Fisheries Sector at the Southern Regional Development Unit (SWP) of South Sulawesi Province

Nurul Wahdaniyah^{1*}, Jufriadi² & Fadhil Surur¹

¹Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata, Kabupaten Gowa, 92113; ²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa Makassar 90231, Jl. Urip Sumoharjo KM.4, Sinrijala, Panakkukang, Kota Makassar;

*Penulis korespondensi. *e-mail* : nurulwahdaniyah27@gmail.com

(Diterima: 15 Januari 2018; Disetujui: 24 April 2018)

ABSTRACT

Regional-based development of the marine and fisheries sector has undergone a change in its way of thinking from mainland-oriented to marine-oriented with the concept of sustainable development. In the Regional Spatial Plan (RTRW) of South Sulawesi Province 2009 until 2029, the southern Regional Development Unit (SWP) covers Jeneponto regency, Bantaeng regency, Bulukumba regency and Selayar Islands regency, which have very potential marine and fisheries sector. This research aims to determine the potential of the marine and fisheries sector in the southern SWP of South Sulawesi Province, to determine the hierarchy of development centers of marine and fisheries sector in the region, and to understand the regional-based development strategies of marine and fisheries sector. The methods used are quantitative analysis utilizing Location Quotient (LQ), Shift-Share, Scalogram, and Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) methods. Results of the analysis shows that leading sector in Jeneponto regency is fishponds, in Bantaeng regency is sea cultivation, in Bulukumba Regency are sea cultivation, fishponds and ricefields, mean while in Selayar Islands regency is capture fishery. As for development centers of the marine and fisheries sector, in Bulukumba regency is classified as hierarchy 1, Bantaeng regency as hierarchy 2, Selayar Island regency as hierarchy 3, and Jeneponto regency as hierarchy 4. Development strategy of marine and fisheries sector at the southern SWP South Sulawesi Province is based on the region and local economy.

Keywords: fishery, marine, regional development.

ABSTRAK

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah mengalami perubahan cara berpikir dari berorientasi daratan menjadi berorientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 sampai 2029, Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) bagian selatan meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang merupakan wilayah dengan sektor kelautan dan perikanan yang sangat potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, menentukan pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta

mengetahui strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, Skalogram dan *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT). Hasil analisis menunjukkan sektor unggulan di Kabupaten Jeneponto adalah tambak, di Kabupaten Bantaeng adalah budidaya laut, di Kabupaten Bulukumba budidaya laut, tambak dan sawah sedangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah perikanan tangkap. Pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bulukumba merupakan hierarki 1, Kabupaten Bantaeng merupakan hierarki 2 dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kabupaten Jeneponto merupakan hierarki 3 dan 4. Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi lokal.

Kata kunci: kelautan, pengembangan wilayah, perikanan.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada) yang melingkupi 17,508 pulau. Sejak tahun 1982, hukum laut Internasional (*United Nations Convention on the Laws of the Sea*, UNCLOS), luas lautan Indonesia mencapai 5.8 juta km² termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2.7 juta km² (UU 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Besarnya potensi tersebut memerlukan batasan pemanfaatan sebagai suatu bentuk pengelolaan kawasan pesisir dan lautan. Batasan wilayah pesisir dan lautan tidak terlepas dari tujuan penggunaan atau pengelolaannya.

Potensi sumber daya kelautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional di masa depan (Kusumastanto, 2003).

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 sampai 2029 yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah dengan sektor kelautan dan perikanan yang sangat potensial. Masing-masing wilayah tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang berbeda-beda.

Besarnya potensi sumber daya kelautan pada SWP bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha perikanan. Sumber daya kelautan yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan pengolahan perikanan yang baik. Belum adanya keterpaduan pengembangan perikanan karena masing-masing daerah mempunyai program tersendiri sehingga perlu memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan perspektif keruangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, penentuan pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan, serta mengetahui strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang

meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Studi ini dibatasi oleh kawasan potensial pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada masing-masing kabupaten.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Metode pengumpulan data dengan teknik observasi lapangan, wawancara/*interview* dan metode instansional. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis *LQ*, *Shift Share*, Skalogram dan SWOT.

Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa aktivitas tersebut dalam wilayah secara agregat. Dalam bahasa matematis yang lebih umum, persamaan LQ merupakan rasio peluang satu elemen data terhadap himpunan bagian (wilayah) dengan peluang nilai satu variabel (kategori) terhadap populasi. Persamaan indeks LQ menurut Blakely (1994) sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_j/X_{..}}$$

dimana:

X_{ij} adalah nilai indikator aktivitas ke-j pada wilayah ke-i,

X_i adalah jumlah seluruh indikator aktivitas di wilayah ke-i,

X_j adalah jumlah indikator aktivitas ke-j di seluruh wilayah, dan

$X_{..}$ adalah penjumlahan nilai indikator seluruh aktivitas di seluruh wilayah

- 1) Jika nilai $LQ_{ij} > 1$, bahwa wilayah ke-i berpotensi untuk mengekspor produk aktivitas ke-j ke wilayah lain karena secara relatif produksinya di atas rata-rata produksi di seluruh cakupan wilayah analisis.
- 2) Jika nilai $LQ_{ij} = 1$, maka wilayah i secara relatif mampu memenuhi kebutuhan internalnya, namun tidak memiliki surplus

produksi yang potensial bisa diekspor ke wilayah lain.

- 3) Jika $LQ_{ij} < 1$, maka pangsa relatif aktivitas ke-j di wilayah ke-I lebih rendah dari rata-rata aktivitas ke-j di seluruh wilayah (Rustiadi & Panuju, 2012).

Analisis Shift Share

Hasil analisis *shift share* diperoleh gambaran kinerja aktivitas di suatu wilayah. Gambaran kinerja ini dapat dijelaskan dari 3 komponen hasil analisis, yaitu:

- 1) Komponen laju pertumbuhan total (komponen *share*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah.
- 2) Komponen pergeseran proporsional (komponen *proportional shift*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktivitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah. Pergeseran proporsional menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah.
- 3) Komponen pergeseran diferensial (komponen *differential shift*). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (*competitiveness*) suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktivitas tersebut secara agregat. Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ketakunggulan) suatu sektor/aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di sub wilayah lain.

Persamaan analisis *shift-share* ini adalah sebagai berikut (Panuju dan Rustiadi, 2012):

$$SSA = \underbrace{\left(\frac{X_{.}(t1)}{X_{.}(t0)} - 1 \right)}_a + \underbrace{\left(\frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} - \frac{X_{.}(t1)}{X_{.}(t0)} \right)}_b + \underbrace{\left(\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} \right)}_c$$

dimana :

a = komponen *regional share*

b = komponen *proportional shift*

c = komponen *differential shift*, dan

$X_{..}$ = Nilai total aktivitas wilayah

X_i = Nilai total aktivitas tertentu

X_{ij} = Nilai di wilayah ke-i, aktivitas ke-j

T_1 = titik tahun akhir

T_0 = titik tahun awal

Analisis Skalogram

Metode Skalogram adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta hierarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Metode ini memberikan hierarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan (Lutfi, 2015).

Modifikasi penting dalam analisis Skalogram dari awal perkembangannya adalah penggunaan data kuantitas fasilitas dan bukan ada atau tidaknya fasilitas, proses pembagian dengan jumlah penduduk yang terlayani (perhitungan kapasitas layanan), mengikutsertakan *invers* jarak menuju fasilitas pelayanan sebagai variabel penentu indeks serta proses pembakuan nilai (Rustiadi & Panuju, 2012).

Analisis SWOT

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats* (SWOT) dengan penentuan *External Factors Analysis Summary* (EFAS) dan *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS). Menentukan faktor-faktor internal eksternal mengikuti pendapat Rangkuti (2009), untuk menentukan data-data yang dipaparkan maka perlu dilakukan perencanaan strategis yaitu menganalisis lingkungan internal yaitu untuk melihat kekuatan yang ada dan meminimalkan kelemahan serta lingkungan eksternal untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman.

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan *rating* pada setiap faktor strategis. Faktor strategis adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang

memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi yang ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan positif. Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman.

Pembobotan pada lingkungan internal dan eksternal diberikan bobot dan nilai (*rating*) berdasarkan pertimbangan profesional. Pembobotan pada lingkungan internal tingkat kepentingannya didasarkan pada besarnya pengaruh faktor strategis terhadap posisi strategisnya, sedangkan pada lingkungan eksternal didasarkan pada kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategisnya. Jumlah bobot pada masing-masing lingkungan harus berjumlah satu, dengan skala 1.00 (sangat penting) sampai dengan 0.00 (tidak penting).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

SWP adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya. SWP dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kawasan andalan. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

Kawasan andalan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata. Kawasan andalan ini minimal memenuhi fungsinya sebagai:

- 1) Tempat aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan;
- 2) Pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/ pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya;
- 3) Kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan.

Penentuan Sektor Komperatif

Penentuan sektor unggulan komparatif dilakukan dengan dasar pemikiran metode dan dasar teori *Location Quotient* (LQ) yaitu mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang termasuk sektor basis maupun non basis pada suatu daerah. Hasil analisis LQ ini mampu menentukan sektor basis pada wilayah SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mengekspor (ke luar daerah) dalam perekonomian wilayah, dengan indikator yang harus menunjukkan kekuatan peranan suatu sektor dalam daerah yaitu wilayah kabupaten dibandingkan dengan peranan sektor yang sama pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Hasil analisis LQ SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten	1			2	
	1a	1b	1c	1d	2a
Jeneponto	0.4	4.0	0.5	0.0	0.8
Bantaeng	1.4	0.1	0.5	0.0	0.7
Bulukumba	1.3	0.2	1.4	1.6	0.8
Kepulauan Selayar	0.3	0.2	0.0	0.0	2.7

Sumber: Hasil analisis, 2017

*Ket:

1 = Perikanan Budidaya

2 = Perikanan Tangkap

1a = Budidaya Laut

1b = Tambak

1c = Kolam

1d = Sawah

2a = Perikanan Laut

LQ > 1 Sektor Basis

LQ < 1 Sektor Non Basis

Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor basis di setiap daerah berbeda. Sektor basis di Kabupaten Jeneponto yaitu tambak dengan nilai LQ 4.0. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto unggul dalam tambak garam. Berbeda dengan Kabupaten Bantaeng yang unggul dalam sektor perikanan budidaya yakni budidaya laut dengan nilai LQ 1.4. Kabupaten Bantaeng sangat terkenal dengan sumber daya rumput lautnya. Sektor basis di Kabupaten Bulukumba yaitu budidaya laut (1.3), kolam (1.4) dan sawah (1.6). Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten kepulauan menunjukkan keunggulannya pada sektor perikanan laut yaitu perikanan tangkap dengan nilai LQ 2.7. Sektor-sektor dengan nilai LQ > 1 memiliki kemampuan untuk dapat mengekspor keluar daerah tersebut.

Peningkatan sektor basis di setiap kabupaten pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam budidaya perikanan baik budidaya perikanan air tawar, air payau, air laut maupun budidaya ikan keramba. Kegiatan budidaya ini berkaitan dengan konsep *capacity builing* (pengembangan kapasitas) yang merupakan upaya mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja untuk mencapai *outcome* (Agustine *et al.*, 2014).

Penentuan Sektor Kompetitif

Kemampuan kompetisi (*competitiveness*) suatu wilayah dapat diukur dengan Analisis *Shift Share*. Analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian di suatu wilayah. Selain itu dapat juga digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama dua periode.

Tabel 2. Hasil analisis *shift share* SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten	1				2	JML
	1a	1b	1c	1d	2a	
Jeneponto	0.05	0.02	-0.19	0.07	0.01	-0.11
Bantaeng	0.18	0.17	2.45	0.07	0.19	2.98
Bulukumba	8.55	0.40	0.64	0.07	0.53	10.19
Selayar	-0.40	0.00	0,52	0.07	0.46	0.05
TOTAL	8.38	0.58	3,42	0.28	1.19	13.85

Sumber: Hasil analisis, 2017

*Ket:

1 = Perikanan Budidaya

2 = Perikanan Tangkap

1a = Budidaya Laut

1b = Tambak

1c = Kolam

1d = Sawah

2a = Perikanan Laut

SSA (+) Sektor Kompetitif

SSA (-) Sektor Non Kompetitif

Penentuan Hierarki Wilayah

Penentuan hierarki wilayah pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Analisis Skalogram. Metode ini menggunakan data fasilitas penunjang sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh setiap wilayah seperti jasa kelautan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), Industri Perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, industri maritim, kelembagaan masyarakat nelayan serta lembaga keuangan mikro. Perhitungan Skalogram ini menggunakan pembagian jumlah penduduk yang terlayani (perhitungan kapasitas layanan), mengikutsertakan *invers* jarak menuju fasilitas pelayanan sebagai variabel penentu indeks serta proses pembakuan nilai (AS, 2013).

Kabupaten Bulukumba yang menempati hierarki 1 dapat menjadi pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan terus meningkatkan sumber daya perikanan dan kelautan serta sarana dan prasarana penunjang. Kabupaten Bantaeng sebagai hierarki 2 dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan budidaya laut yaitu budidaya rumput laut yang merupakan sektor unggulannya. Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan perikanan laut (perikanan tangkap) serta pengembangan pariwisata bahari yang banyak dikembangkan contohnya Taman Nasional Taka Bonerate yang telah menjadi

kawasan wisata unggulan wilayah maupun ditingkat nasional. Kabupaten Jeneponto dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan perikanan budidaya dalam hal ini tambak garam yang merupakan sektor unggulannya dan mampu menciptakan pengusaha sebanyak 1,000 orang melalui berbagai unit usaha.

Keterpaduan lintas sektor, antar sektor maupun wilayah merupakan strategi pembangunan perikanan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu pembangunan perikanan yang mantap dan efisien di dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan (Umar, 2011).

Tabel 3. Hierarki wilayah dan sektor unggulan SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten	Sektor Unggulan		Skalogram
	Sub Sektor	Jenis	
Bulukumba	Budidaya Laut	Rumput Laut, Bandeng dan Udang	Hierarki 1
	Kolam Sawah	Lele Nila	
Bantaeng	Budidaya Laut	Rumput Laut, Bandeng	Hierarki 2
Kepulauan Selayar	Perikanan Laut	Tuna, Kakap	Hierarki 3
Jeneponto	Tambak	Garam	Hierarki 4

Sumber: Hasil analisis, 2017

Strategi Pengembangan

Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi yang dapat dikembangkan yaitu meningkatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang. Meningkatkan peluang dari segi produksi perikanan, jasa kelautan, pariwisata bahari, serta sarana dan prasarana penunjang.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, maka melalui matriks SWOT akan ditemukan beberapa strategi pengembangan yang dapat mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis SWOT yang disajikan, disusun beberapa alternatif pengembangannya sebagai strategi khusus, yang merupakan opsi-opsi pengembangan dari *grand strategy*.

Tabel 4. IFAS Faktor kelemahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
Pertambangan Laut	0.054	1.50	0.081
Industri Galangan Kapal	0.054	1.75	0.095
Jasa Perbaikan (<i>docking</i>)	0.055	1.69	0.093
Industri Pengolahan minyak dan gas bumi	0.055	1.50	0.083
Jumlah	0.218		0.351

Sumber: Hasil analisis, 2017

Tabel 5. EFAS Faktor peluang pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
Kelembagaan Masyarakat Nelayan	0.27	2.81	0.759
Program Yang Telah Dilakukan Dalam Kaitan Kelestarian Kawasan	0.20	2.94	0.588
Kedudukan Kawasan Dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten	0.23	3.13	0.719
Jumlah	1.00		2.066

Sumber: Hasil analisis, 2017

Analisis selanjutnya adalah memasukkan bobot masing-masing indikator dari tiap-tiap parameter pada lingkungan eksternal sesuai dengan pembobotan dan penilaian responden. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan antara skor penilaian faktor eksternal peluang dan ancaman yaitu 1.447 (2.066 sampai 0.619). Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peluang dalam pengembangannya mengingat skor berada pada rentang nilai dengan kategori berpeluang.

Peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini harus diseimbangkan dengan kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan yang memadukan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan di dalamnya. Aspek lingkungan mencakup sistem alam, yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem dan lingkungan biofisik. Aspek sosial mencakup sistem manusia, termasuk di dalamnya adalah nelayan, pengolah, dan masyarakat. Sistem pengolahan perikanan memuat pengembangan perikanan yang memperhatikan kedua aspek tersebut (Adam, 2012). Keberlanjutan pengembangan perikanan juga dapat ditinjau dari aspek politik yang memuat di dalamnya konsistensi kebijakan yang telah ada. Strategi khusus dapat dijabarkan hasil rumusan dari setiap strategi yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Strategi khusus dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi lokal. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi perikanan (perikanan budidaya dan perikanan tangkap), peningkatan jasa kelautan (TPI, PPI, industri perikanan, pelabuhan), pariwisata bahari, sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan hasil produksi juga memerlukan faktor tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan perikanan umumnya tenaga kerja yang berasal dari keluarga nelayan sendiri yang disesuaikan dengan peran dalam tahapan persiapan, proses

produksi, panen dan pemasaran (Haluan & Budiastara, 2014). Mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan target pasar nasional maupun internasional serta pengembangan kawasan harus disesuaikan dengan fungsi wilayah.

Menurut Kusumastanto (2003) ada 7 spektrum ekonomi kelautan yaitu sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan perekonomian nasional. berdasarkan hasil analisis sektor unggulan di SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan masuk pada spektrum perikanan, pariwisata bahari, industri maritim dan jasa kelautan.

Pengembangan dan penguatan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan menciptakan efek penggandaan (*multiplier effect*) yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan dan memicu pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan moral dan etos kerja penduduk pesisir yang berorientasi kepada budaya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan akses masyarakat pesisir terhadap permodalan, pasar, teknologi dan manajemen, informasi dan aset-aset ekonomi produksi lainnya (Sofyani, 2010).

Tabel 6. Matriks Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

<p>Faktor Internal</p>	<p>Strengths/ Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Perikanan Tangkap 2. Produksi Perikanan Budidaya 3. Produksi Perikanan Darat 4. TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 5. PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) 6. Industri Perikanan 7. Pelabuhan 8. Pariwisata Bahari 9. Perhubungan Laut 10. Transportasi 11. Air Bersih 12. Sanitasi Lingkungan 13. Persampahan 	<p>Weaknesses/ Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan Laut 2. Industri Galangan Kapal 3. Jasa Perbaikan (<i>docking</i>) 4. Industri Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
<p>Faktor Eksternal</p> <p>Opportunities/ Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan Masyarakat Nelayan 2. Program yang Telah dilakukan dalam Kaitan Kelestarian Kawasan 3. Kedudukan Kawasan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten 	<p>Strategi (SO)</p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang</p> <p>Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi lokal</p>	<p>Strategi (WO)</p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>Strategi pengembangan sumber daya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat</p>
<p>Threats/ Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Keuangan Mikro 2. Minat Masyarakat Pesisir 	<p>Strategi (ST)</p> <p>Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p>Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis masyarakat</p>	<p>Strategi (WT)</p> <p>Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p> <p>Strategi pengembangan sarana dan prasarana industri berbasis masyarakat</p>

Tabel 7. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan

SO	Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi lokal	Peningkatan hasil produksi perikanan Peningkatan sarana dan prasarana Pengembangan sektor unggulan sesuai dengan perminatan pasar Pengembangan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah
ST	Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis masyarakat	Peningkatan kelembagaan masyarakat nelayan Pengembangan minat masyarakat pesisir
WO	Strategi pengembangan sumber daya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat	Pengembangan potensi pertambangan Pengembangan postensi industri maritim
WT	Strategi pengembangan sarana dan prasarana industri berbasis masyarakat	Pengembangan SDM masyarakat pesisir Pengembangan sarana industri

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shift Share* untuk menjawab rumusan masalah pertama, maka sektor unggulan di Kabupaten Jeneponto adalah tambak dalam hal ini tambak garam, Kabupaten Bantaeng (budidaya laut yaitu rumput laut), Kabupaten Bulukumba (budidaya laut, tambak dan sawah) sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar sektor unggulannya adalah perikanan tangkap.
2. Berdasarkan hasil analisis Skalogram dalam menjawab rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba menempati hierarki 1 dapat menjadi pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan terus meningkatkan sumber daya perikanan dan kelautan serta sarana dan prasarana penunjang. Kabupaten Bantaeng sebagai hierarki 2 dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan budidaya laut dalam hal ini budidaya rumput laut yang merupakan sektor unggulannya. Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan perikanan laut (perikanan tangkap) serta pengembangan pariwisata bahari yang banyak dikembangkan. Sedangkan Kabupaten Jeneponto dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan perikanan budidaya dalam hal ini tambak garam yang merupakan sektor unggulannya.
3. Strategi pengembangan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu dengan hasil analisis SWOT yaitu strategi khusus dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada SWP bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi lokal. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi perikanan (perikanan budidaya dan perikanan tangkap), peningkatan jasa kelautan (TPI, PPI, industri perikanan, pelabuhan), pariwisata bahari, sarana dan prasarana penunjang. Selain itu juga pengembangan kawasan harus disesuaikan dengan fungsi wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis banyak dibantu oleh banyak pihak sehingga melalui karya ini pula, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Kepulauan Selayar beserta jajarannya. Keluarga besar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga ini dicatat sebagai amalan baik kita semua untuk kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, A. D., Noor, I., & Said, A. (2014). Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, II (2), 4-5.
- AS, N. (2013). *Struktur Tata Ruang Wilayah dan Kota*. Makassar: Alauddin University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2017). *Kabupaten Bantaeng dalam Angka Tahun 2016*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2017). *Kabupaten Bulukumba dalam Angka Tahun 2016*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. (2017). *Kabupaten Jeneponto dalam Angka Tahun 2016*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. (2017). *Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka Tahun 2016*
- Haluan, J., & Budiastara, I. K. (2014). Status Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Budidaya di Pulau-Pulau Kecil Makassar. *Jurnal Manajemen Perikanan dan Kelautan*, I (1), 9-10.
- Kusumastanto. (2003). *Pengembangan Sumber daya Kelautan dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lutfi, M. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFG Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032
- Peraturan Daerah Kabupaten Blukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
- Rencana Strategis Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
- Rustiadi, & Panuju. (2012). *Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sofyani, T. (2010). Peranan Sektor Perikanan dan Kelautan dalam Perekonomian Wilayah Provinsi Riau. *Jurnal Perairan*, VIII (1), 10-11.
- Umar, A. Z. (2011). Pengembangan Agribisnis Terpadu di Sektor Perikanan. *Jurnal INOVASI*, VIII (4), 1-2.